

## DAFTAR PUSTAKA

- Klikdesakujepara.com (Website Dinsospermades Kabupaten Jepara) Diakses 20 September 2018.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kolle (1974) dalam Bintarto (1989), *kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan*.
- publikasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1961 yang berjudul *International Defenition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide*.
- bpsjepara.go.id (Website BPS Kabupaten Jepara) Badan Pusat Statistik, di akses 20 September 2018.
- Menurut Rahardjo (2006: 19) *Prinsip Pembangunan Desa*.
- P. Loina Lalolo Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta .
- H.A.R Tilaar, 2009, *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Wibawa Efendi Sofian (Wibawa, 1991: 14) *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Williamson et.al (1982: 184-185) *“the typical intensive interview study is based on fewer than fifty respondents, where as the typical survey is based on several hundreds. Intensive interviewing (in-depth interview) studies are generally based on small, non probability samples”*.  
Kurang lebih artinya, ciri khas dari wawancara.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono (2008), *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Gondokusumo. 2005. *Keberlanjutan Kawasan Kota: Perspektif Kemiskinan Lingkungan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21*. Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)
- Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat :Tinjauan Aspek Sosiologis Ekonomi, Perencanaan*, Liberty: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 *tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa*.
- Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 *tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*.
- Undang – undang No.11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 *Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018*.
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 *Tentang Perencanaan Pembangunan Desa*.

Peraturan Desa Karanggondang Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Karanggondang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2019*

Peraturan Desa Karanggondang Nomor 6 Tahun 2019 *Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2020*

Peraturan Desa Karanggondang Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025*

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lkppdes) Tahun 2018

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lkppdes) Tahun 2019

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lkppdes) Tahun 2020

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lppdesa) Tahun 2018

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lppdesa) Tahun 2019

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lppdesa) Tahun 2020